

477

# Situasi Perjuangan Kebangsaan Kita\*

Soepardjo RUSTAM

## PENGANTAR

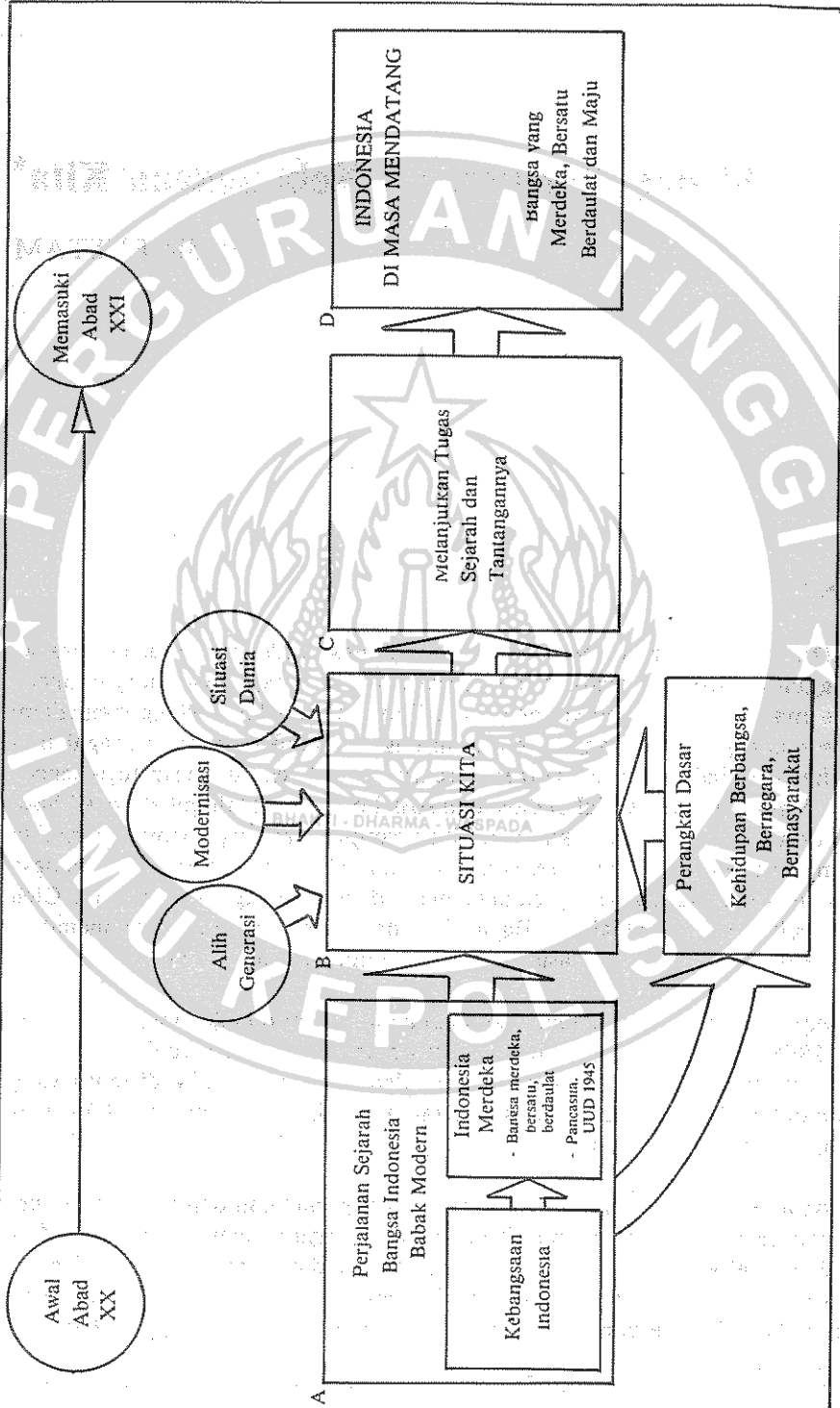
Ditinjau dari proses perjalanan hidup bangsa Indonesia, saat ini kita sesungguhnya sedang berada di dalam suasana penuh tantangan dengan aneka rupa masalah yang sifatnya mendasar. Pada saat ini kita sedang mengalami proses alih generasi, yang secara langsung dihadapkan pada berbagai perubahan-perubahan perkembangan di sektor-sektor kehidupan strategis seperti ekonomi, teknologi, sosial budaya dan sosial politik. Di lain pihak, hasil-hasil pembangunan yang dapat kita wujudkan sampai sekarang, memang semakin memantapkan tekad untuk terus melanjutkan perjalanan perjuangan bangsa kita, menjadi bangsa yang semakin maju di masa yang akan datang. Oleh karena itu, tepat sekali ajakan Bapak Presiden Soeharto untuk mulai memikirkan Pola Pembangunan Nasional Jangka Panjang yang kedua.

Apabila pada pertengahan abad kedua puluh, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya dan menjadi bangsa yang merdeka, bersatu dan berdaulat, maka di masa yang akan datang bangsa Indonesia harus tetap menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat dan maju.

Kita semua tahu, bahwa kemajuan berarti perubahan dan juga bahwa kemajuan membawa serta permasalahan yang sifatnya majemuk. Salah satu masalah di dalam kemajuan tersebut adalah terjadinya perubahan nilai-nilai. Ada nilai-nilai lama yang harus ditinggalkan, ada nilai-nilai baru yang harus dicernakan. Dan perubahan nilai tersebut bukanlah sesuatu yang berjalan sen-

\*Ceramah Menteri Dalam Negeri di depan Seminar 20 Tahun Orde Baru, 3 Maret 1986, di Jakarta.

PETA SITUASI INDONESIA



Kebangkitan Nasional

Proklamasi Kemerdekaan

Orde Baru

Perjalanan Perjuangan Bangsa Indonesia ke Depan

diri; tidak jarang ia mengkait dengan perubahan *institusi*, seringkali ia membawa dampak terhadap kenyataan *sosiologis* dan *psikologis* di dalam masyarakat, bahkan menyertakan implikasi terhadap kehidupan kenegaraan, politik dan kemasyarakatan.

Kalau kita semua menyadari, bahwa perjalanan sejarah yang melibatkan kita itu adalah perjalanannya bangsa Indonesia, maka tidak dapat tidak, kita harus pula sampai kepada masalah mendasar berikut ini: bagaimanakah posisi kebangsaan Indonesia terhadap perubahan-perubahan nilai yang akan dibawa serta oleh tekad kita untuk mencapai kemajuan-kemajuan? Bagaimanakah posisi Pancasila, ideologi serta asas kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat kita ini di dalam proses menuju kepada kemajuan tersebut dengan segala masalah dan tantangannya? (Lihat Peta Situasi Kita)

Masalah mendasar mengenai kebangsaan Indonesia dan Pancasila itu akan dapat menjadi makin terasa, karena dipacu oleh kenyataan, bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat Nusantara yang sifatnya terbuka. Perkembangan di masa datang akan semakin membawa bangsa Indonesia terjalin di dalam interaksi dan komunikasi yang lebih intensif dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini.

Maka perlu kita renungkan: bagaimanakah posisi kebangsaan dan posisi Pancasila di dalam percaturan dunia yang menjadi makin kompetitif, dan karenanya juga akan memacu kecenderungan komparatif? Untuk itu semua memang amat besar manfaatnya apabila kita membuat suatu renungan strategis: menengok pengalaman ke belakang, memahami situasi saat ini, dan melihat cakrawala ke depan.

## DESKRIPSI SEJARAH PERJUANGAN BANGSA INDONESIA

### Kebangkitan Nasional

Sebagai peristiwa sejarah; proklamasi, konstitusi dan ideologi bukanlah hal-hal yang berdiri sendiri. Peristiwa besar yang telah melahirkan dan mengukuhkan bangsa Indonesia, yang telah menetapkan serta mencanangkan suatu ideologi nasional, memang tidak terlepas dari proses sejarah yang memangkunya, yaitu zaman Kebangkitan Nasional. Pemahaman kita mengenai proklamasi, konstitusi dan ideologi, harus bertolak dari pemahaman tentang zaman Kebangkitan Nasional tersebut.

Di sekitar awal dasawarsa abad ke dua puluh ini, muncullah kebangkitan nasional rakyat Indonesia. Walaupun pada mulanya gerakan-gerakan itu ma-

sih bersifat majemuk dan terpisah-pisah, namun di dalam perkembangannya menemukan titik temu yang mendasar.

Pada tahun 1928 dinamika kebangsaan itu diungkapkan secara lebih jelas dan tegas di dalam bentuk Sumpah Pemuda, di mana diikrarkan satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Di dalam suasana pertumbuhan cita-cita kebangsaan ini pula, mendengunglah lagu Indonesia Raya, yang selanjutnya menjadi lagu kebangsaan kita, sebagai manifestasi simbolik dari cita-cita kebangsaan Indonesia.

Perjalanan kebangkitan nasional ini pun mengalami pasang-surut, sebagai akibat dari tumbuh dan berkembangnya bermacam-macam aliran yang secara sadar atau tidak telah menggiring perjalanan historis kebangsaan kita untuk kembali pada suasana dan sifat divergensi dan heterogenitas. Namun demikian, berbagai halangan dapat diatasi, berbagai rintangan dapat dilampaui, dan kebangkitan nasional telah mengantarkan rakyat Indonesia memasuki pintu gerbang kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945.

### **Proklamasi Kemerdekaan**

Dengan selesainya babak kebangkitan nasional bangsa Indonesia memasuki zaman kemerdekaan, yang tidak lepas dari suasana perjuangan, karena zaman ini merupakan perjalanan bangsa Indonesia untuk tetap mempertahankan kemerdekaan, persatuan dan kesatuan.

Kemerdekaan, kedaulatan, persatuan dan kesatuan adalah suatu anugerah, dan sekaligus adalah suatu tanggung jawab. Cobaan demi cobaan datang, baik dari luar maupun dari dalam, yang membawa serta ancaman, gangguan, dan hambatan-hambatan. Zaman kemerdekaan bukanlah perjalanan yang tanpa rintangan. Ini terjadi secara berantai dan berangkai dari sejak tahun 1945 sampai dengan tahun 1965.

### **Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan, Persatuan dan Kedaulatan**

Selama 20 tahun sesudah Proklamasi Kemerdekaan, dari tahun 1945 sampai tahun 1965, kita harus mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dari segala macam ancaman dan marabahaya. Dari tahun 1945 hingga pengakuan kedaulatan menjelang akhir tahun 1949, kita berjuang dalam perang kemerdekaan. Melalui perjuangan berat dan lama, bangsa kita berhasil membulatkan wilayah Indonesia dengan merebut kembali Irian Jaya pada tahun 1962 yang semula masih berada dalam ke-

kuasaan Belanda. Sejak pengakuan kedaulatan dan pada tahun-tahun sesudahnya, kita berjuang melawan bahaya-bahaya yang datang dari paham-paham federalisme, separatisme, kesukuan, kedaerahan, ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Tidak jarang segala ancaman dan bahaya tadi bercampur dengan subversi asing.

Dalam pada itu, pencantuman butir-butir Pancasila dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, telah memberi kekuatan kepada bangsa kita untuk bertahan melawan paksaan kekerasan, baik dari dalam maupun dari luar, yang mengancam, merusak dan bahkan mau memusnahkan kemerdekaan, kedaulatan, persatuan dan kesatuan kebangsaan kita. Di dalam fase ini, Pancasila manunggal pula dengan ketahanan perjuangan rakyat Indonesia.

Gerak percaturan politik itu menjangkau baik kehidupan kenegaraan maupun kehidupan kemasyarakatan. Suasana "multi-ideologi" mempengaruhi pula kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan kita.

Salah satu episode yang dapat secara gamblang mengungkapkan betapa masalah ideologi merupakan hal yang amat sentral pada masa itu adalah terjadinya Peristiwa Madiun: pemberontakan PKI-Muso. Pada tanggal 18 Desember 1948 tokoh-tokoh PKI di Madiun memproklamasikan berdirinya "Republik Soviet Indonesia."

Bahwa pemberontakan PKI-Muso itu mempunyai asas ciri ideologi, amatlah jelas. Dan Pancasila, ideologi kebangsaan kita, merupakan acuan penangkal yang kuat, sebagaimana dinyatakan oleh Bung Karno pada pidato radio tanggal 28 Oktober 1948:

... Demikianlah jadinya kalau orang tidak berdiri lagi pada dasar Pancasila. Mereka meninggalkan nasionalisme oleh karena mereka memecah persatuan bangsa. Mereka meninggalkan kemanusiaan, oleh karena mereka berbuat yang tidak berkemanusiaan. Mereka meninggalkan kedaulatan rakyat, oleh karena mereka memperkosa kehendak rakyat terbanyak. Mereka meninggalkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena mereka tidak percaya kepada Tuhan. Mereka meninggalkan keadilan sosial, oleh karena mereka meninggalkan gotongroyong yang sejati...

Ditandatangani pengakuan kedaulatan bukanlah berarti selesainya perjuangan mempertahankan kemerdekaan, persatuan dan kedaulatan. Di tingkat internasional, kita masih menghadapi masalah Uni Indonesia-Belanda dan terutama masalah Irian Jaya. Di tingkat nasional pergolakan-pergolakan pun masih terjadi: ada gerakan DI/TII/NII, petualangan APRA, pergolakan RMS; pertentangan-pertentangan politik yang sifatnya terbuka pada jalur ketatanegaraan.

Terbentuknya kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950 adalah suatu episode yang penting di dalam perjalanan

bangsa Indonesia, karena bentuk negara kita sepenuhnya dikembalikan kepada cita-cita Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Namun, perjalanan untuk mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan dan persatuan ternyata belum memperoleh ketetapan dan kemantapan yang meyakinkan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor. Sistem ketatanegaraan sebagaimana ditentukan di dalam UUDS 1950 yang berlaku pada waktu itu mengandung percampuran yang tidak serasi antara "Weltanschauung" persatuan kebangsaan di satu pihak dengan "Weltanschauung Liberalistik" di lain pihak. Dalam pada itu, sifat kesementaraan dari konstitusi itu sendiri mengundang pergulatan politik dan pergulatan ideologi untuk memberi ciri pada bentuk dasar dari negara Indonesia.

Kehidupan politik formal dengan sendirinya tumbuh di dalam suasana perpecahan, di dalam sekat-sekat pengkotakan politik ideologis yang bersifat struktural dan dogmatik. Pertumbuhan kekuatan politik seperti itu tercermin di dalam jatuh-bangunnya kabinet, silih berganti, yang menunjukkan ketidakmampuan dari sistem yang berlaku.

Proses terpecah-pecahnya ideologi seperti itu mengalami peningkatan, makin intensif dan ekstensif, dengan diselenggarakannya pemilihan umum. Dan tanpa disadari, PKI yang dalam tahun 1948 telah melancarkan pemberontakan, bahkan memproklamasikan berdirinya Republik Soviet Indonesia, memiliki pula kesempatan dan hak untuk ikut serta di dalam pergulatan politik dan ideologi tersebut.

Gejolak politik ideologi itu terus berlanjut hingga masa sesudah dibentuknya DPR dan Konstituante. Pergolakan yang bersifat separatisme ideologis maupun teritorial, terjadi. Perpecahan pun semakin melukai persatuan bangsa. Bahkan, di dalam sidang Konstituante terungkap secara terbuka perpecahan ideologi yang sifatnya mendasar, yakni pada waktu diperdebatkan tentang dasar negara. Hanya melalui Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, situasi itu dapat diatasi.

Tetapi sejarah mencatat, bahwa problem ideologi dan masalah yang menyangkut kemantapan Pancasila masih menghadang perjalanan bangsa Indonesia. Hal ini disebabkan antara lain karena Dekrit itu sendiri dipermasalahkan. Di samping itu, pernyataan berlakunya kembali UUD 1945 tidak dilanjutkan dengan pelaksanaan yang konsekuen dan konsisten, sehingga penyimpangan-penyimpangan terus saja terjadi.

Pancasila dipandang melulu sebagai wadah dan bukan isi, sehingga kekuatan-kekuatan politik dan kemasyarakatan berpacu untuk mengisinya dengan ciri ideologi mereka masing-masing. Kehidupan politik, baik pada ta-

taran institusional maupun pada tataran kemasyarakatan masih tidak berbeda dengan situasi sebelumnya. Kesadaran, bahwa Pancasila adalah wadah dan sekaligus juga isi, kurang dikembangkan. Pada masa itu, belum disadari bahwa Pancasila dapat mewadahi kehidupan seluruh bangsa Indonesia, yang bersatu, merdeka dan berdaulat, justru karena isinya itu.

Di dalam kemelut politik yang tidak kunjung selesai itulah PKI dengan jembatan proses Nasakom, membangun kekuatan, baik di tingkat kenegaraan, di tingkat politik institusional maupun di tingkat kemasyarakatan. Semua itu akhirnya bermuara kepada terjadinya Gerakan G-30-S/PKI. Bangsa Indonesia ditantang lagi untuk mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan dan persatuannya.

Peristiwa demi peristiwa yang menyertai perjalanan bangsa kita itu telah menyentak kesadaran rakyat Indonesia untuk mengambil hikmah dari pengalaman sejarahnya: bahwa jalan yang paling tepat untuk kita tempuh sebagai bangsa yang merdeka, bersatu dan berdaulat adalah kembali kepada cita-cita Proklamasi Kemerdekaan. "Engagement" dan "Commitment" total kepada Ideologi Pancasila adalah pilihan yang disimpulkan dari pengalaman sejarah yang berat dan panjang ini. Dan, itulah pula yang menjadi sumber motivasi bagi kelahiran Orde Baru di atas pentas sejarah nasional.

### **Masa Orde Baru: Pembangunan sebagai Pengamalan Pancasila**

Tekad dan kehadiran Orde Baru, ditandai oleh keinginan yang kuat untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Tekad dan keinginan ini mengandung pengertian, bahwa pada masa pemerintahan sebelumnya telah terjadi berbagai penyelewengan dan penyimpangan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, terutama dalam bidang politik/kenegaraan.

Nasakomisasi kehidupan politik merupakan contoh konkret dari penyelewengan ideologis, yang pada puncaknya justru menghasilkan malapetaka politik tahun 1965 (G-30-S/PKI). Suatu bentuk pemberontakan yang secara langsung mengancam eksistensi Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia. Dalam perkembangan kehidupan politik di masa Orde Baru, telah berlangsung berbagai upaya untuk menghilangkan segala eksek dari politik Nasakomisasi itu dalam kehidupan politik nasional, dan seiring dengan upaya tersebut dilakukan pula penataan kembali struktur politik formal, baik di sektor suprastruktural maupun infrastrukturnya. Suatu langkah yang konsepsi dasarnya telah diletakkan oleh Pejabat Presiden RI Soeharto melalui Pidato Kenegaraan tanggal 16 Agustus 1967.

Namun demikian, tekad untuk menata kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan berdasarkan Pancasila harus dilaksanakan setapak demi setapak, karena suasana kehidupan multi ideologi yang menjadi sumber perpecahan dan disintegrasi bangsa, masih belum tersembuhkan dari kehidupan bangsa kita. Selain itu, pembangunan nasional harus tetap dilaksanakan secara konstitusional serta diselenggarakan secara terencana berkesinambungan.

Dengan kenyataan sejarah yang seperti itu, perjalanan Orde Baru pun harus terlebih dulu melampaui beberapa fase pengamanan ideologis, untuk mengantar bangsa Indonesia memasuki fase Pengamalan Pancasila.

Penyelenggaraan pemilihan umum secara teratur sejak tahun 1971 merupakan langkah politik yang secara nyata membedakan Orde Baru dengan pemerintahan sebelumnya. Proses pemilihan umum itu juga merupakan gambaran dari tahap-tahap kristalisasi politik di sektor infrastrukural, di mana berlangsung proses penyederhanaan kehidupan kepartaian, serta penyatuan langkah di dalam derap pembangunan nasional, yang secara konsisten dilaksanakan oleh Orde Baru. Pemilihan Umum 1971 merupakan langkah awal untuk melihat realitas keberadaan daripada kekuatan-kekuatan sosial politik yang ada dalam masyarakat.

Kemenangan Golkar yang cukup meyakinkan pada Pemilihan Umum 1971 merupakan titik awal yang penting dari perombakan struktur politik Indonesia. Terbentuknya kekuatan mayoritas mutlak Golkar dalam lembaga-lembaga legislatif, baik pada tingkat nasional maupun daerah, merupakan salah satu jaminan bagi keabsahan sistem politik Orde Baru.

Keadaan ini memungkinkan dimatangkannya kondisi politik yang mengarah kepada penyederhanaan jumlah partai-partai politik di Indonesia, yang kemudian terwujud melalui Undang-undang Nomor 3 tahun 1975, di mana hanya terdapat dua partai politik (PPP dan PDI) dan satu Golkar.

Mendampingi kekuatan sosial politik itu, bangsa Indonesia memiliki ABRI yang mengemban dwifungsinya. Dipandang dari segi jumlahnya, perubahan dari sembilan partai politik (Partai NU, Parmusi, Perti, PNI, IPKI, Partai Kristen, Partai Katolik dan Murba) menjadi dua itu, merupakan prestasi politik yang luar biasa. Hal itu merupakan sesuatu yang hampir mustahil untuk terwujud pada masa sebelumnya. Prestasi politik Orde Baru dengan Undang-undang No. 3/1975 itu bukan hanya berkenaan dengan penyederhanaan jumlah partai politik, tetapi juga tidak terlepas dari kenyataan tentang ditempatkannya Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai asas utama dari Partai Politik dan Golkar [Pasal 2 ayat (1)]. Walaupun dalam Pasal 2 ayat (2) masih tetap diakui adanya asas/ciri lain.



Permasalahan yang dihadapi justru terletak pada kenyataan tentang tidak konsistennya penerimaan formal itu dengan perilaku politik yang ditampilkan oleh kekuatan-kekuatan sosial politik dimaksud. Keadaan yang kurang memuaskan itu sebenarnya merupakan kompleksitas kehidupan politik, yang terbentuk dari berbagai faktor yang berinteraksi, namun diyakini bahwa sebab utamanya justru bertolak dari kenyataan masih dominannya asas/ciri spesifik dari partai-partai politik tersebut.

Dalam pada itu, sidang MPR-RI tahun 1978, telah tampil sebagai momentum yang mempunyai nilai kualitatif strategis. Sidang tersebut antara lain menghasilkan Ketetapan MPR-RI Nomor II Tahun 1978 tentang Ekaprasetia Pancakarsa, yaitu Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Langkah tersebut dilanjutkan dalam Sidang MPR-RI 1983, dengan ditetapkannya Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi kekuatan sosial politik, yang menetapkan pula bahwa pembangunan nasional pada hakikatnya adalah Pengamalan Pancasila.

Dengan tekad ini, ideologi Pancasila telah kita tempatkan sebagai sumber nilai dan sekaligus sebagai "motivating force" di dalam rangka pembangunan. Harapan ini bukan merupakan hal yang mustahil, karena ideologi, terutama jika dalam dirinya terkandung nilai-nilai operasional yang dapat membangkitkan kesadaran dan solidaritas, yang menuntut ketaatan dan sekaligus komitmen untuk bertindak, bukan saja tetap relevan sebagai sumber motivasi pembangunan, tetapi juga dapat memberi dorongan bagi tegaknya sikap-sikap disiplin di dalam proses pembangunan itu. Pada tingkat kesadaran yang semacam ini, ideologi akan menjadi sumber nilai, yang di samping memberi motivasi bagi penyelenggaraan pembangunan, juga menjadi pengendali efektif dari perilaku orang-orang yang terlibat di dalam proses pembangunan itu. Dengan ditetapkannya Pancasila sebagai sumber motivasi bagi seluruh gerak pembangunan nasional, dan menjadi satu-satunya asas kehidupan politik kita, berarti kita telah mengarah secara mantap menuju integrasi nilai yang lebih tuntas.

Adapun tentang kesatuan ideologi, seperti yang telah saya kemukakan di atas, kita baru saja menyaksikan tahap terakhir dari keputusan politik yang merupakan konsensus nasional untuk menempatkan Pancasila sebagai satu-satunya asas, yaitu Tap MPR No. II Tahun 1983 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara. Ketetapan ini kemudian telah dijabarkan ke dalam undang-undang di bidang politik yang baru saja disahkan oleh DPR-RI. Konsensus ini merupakan prestasi politik yang tidak pernah kita capai sebelumnya. Perjalanan kehidupan politik nasional kita, tampaknya memerlukan waktu antara 35 hingga 40 tahun untuk sampai kepada konsensus itu.

Oleh karena itu, penerimaan Pancasila sebagai satu-satunya asas, berdasarkan atas kenyataan bahwa konsensus itu tercapai pada tingkat majelis ter-

tinggi (MPR), merupakan isyarat yang penting tentang tingkat kemajuan dan kematangan yang dapat dicapai oleh sistem politik Orde Baru. Dalam pada itu, kesungguhan Orde Baru untuk memperluas Penghayatan Rakyat atas Pancasila, walaupun hasil-hasilnya masih memerlukan pengkajian yang lebih mendalam, namun cukup banyak pertanda yang dapat dijadikan alat penilai. Semakin cerahnya iklim kehidupan beragama serta hubungan antara umat beragama, semakin banyaknya lembaga-lembaga sosial yang bergerak di bidang kemanusiaan dalam masyarakat, semakin pupusnya sentimen-sentimen etnik dan semakin berkembangnya rasa kebangsaan, semakin luasnya penerimaan masyarakat atas nilai-nilai gotong-royong, musyawarah dan kekeluargaan, serta semakin giatnya usaha-usaha pemerintah untuk menciptakan pemerataan dan keadilan sosial, merupakan pertanda umum yang dapat menggambarkan adanya kecenderungan cukup kuat dalam masyarakat untuk semakin menghayati nilai-nilai Pancasila. Hal ini sejalan pula dengan pelaksanaan Tap No. II/MPR/1978 tentang P-4 yang kemudian menjadi buku-buku pegangan utama dalam penataran-penataran P-4.

Namun demikian, semua gambaran yang disajikan di atas tidak secara serta-merta akan mengantarkan kita pada integrasi nilai dalam arti yang benar-benar hidup dan efektif, karena hal itu masih akan teruji melalui langkah-langkah nyata yang akan kita tempuh di masa mendatang.

Seperti telah kita ketahui bersama, perkembangan kehidupan politik tidaklah selalu bergerak secara linear ke depan, dengan akumulasi nilai-nilai yang seluruhnya bersifat konstruktif. Hukum kehidupan mengajarkan kepada kita bahwa kegagalan untuk maju, biasanya berarti suatu kemunduran. Dalam konteks pembangunan politik, walaupun kondisi dan kerangka ideologi yang utuh telah disepakati, selalu diperlukan sejumlah persyaratan untuk dapat mewujudkan tujuan-tujuannya. Bahkan, ancaman terhadap Pancasila tidak dapat kita anggap telah hilang sama sekali. Hal ini juga telah seringkali dikemukakan oleh Bapak Presiden, di mana beliau mengharapkan ditingkatkannya sikap waspada dan mawas diri.

Perlu kita catat, bahwa di masa lampau, jalan memasuki fase pengamalan Pancasila tidak pernah bebas dari gejolak. Berulang kali ditimbulkan suasana yang mengacaukan Pancasila dengan agama, bahkan mempertentangkan Pancasila dengan agama. Oleh sementara pihak, dibangkitkan apa yang dinamakan "ideologi alternatif" dan untuk itu disebarluaskan resistensi intelektual terhadap Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia.

Sekarang menjadi bertambah jelas bahwa Pancasila bukanlah ideologi yang dogmatik dan tertutup. Pancasila merupakan ideologi yang harus dihayati secara terbuka dan kreatif. Esensi dari pembangunan ideologi itu adalah menyatukan seluruh bangsa Indonesia.

## SITUASI KITA SEKARANG: MERAKIT KERANGKA LANDASAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Terwujudnya pemantapan ideologi Pancasila, membuat perjalanan bangsa Indonesia menjadi bertambah mantap pula. Berlandaskan kepada acuan dasar nasional yang dipegang secara teguh, kita mengalami suasana stabilitas politik dan pemerintahan yang paling panjang selama sejarah kemerdekaan. Dalam pada itu, pembangunan nasional telah dapat diselenggarakan secara terencana dan berkesinambungan dengan Pelita I, II dan III yang telah selesai, dan fase Pelita IV yang dewasa ini sedang kita laksanakan.

Semua itu merupakan modal yang amat berharga, dan menjadi makin relevan disebabkan karena memasuki usia 41 tahun kemerdekaan, bangsa Indonesia memasuki pula babak baru di dalam perjalanan sejarahnya. Darma bakti Angkatan Empat Puluh Lima telah menjelang masa kepurnaanannya, seiring dengan semakin tampilnya Generasi Penerus pada berbagai peranan kepemimpinan. Dalam pada itu, kita pun terlibat dalam situasi dunia yang penuh dengan masalah, gejolak, dengan segala kecemasan yang menyertainya. Pembangunan nasional yang kita laksanakan telah membawa hasil-hasil nyata, akan tetapi telah pula meningkatkan dinamika serta memacu penyaluran aspirasi, yang semakin tinggi frekuensinya dan semakin luas pula ruang lingkungannya. Perkembangan ini, tidak jarang membawa serta permasalahan yang memerlukan penanganan secara arif.

Di sinilah maknanya, mengapa Pelita IV dan V nanti dapat dipandang sebagai tahap yang bersifat strategis. Di dalam Pelita IV ini kita akan membangun kerangka landasan pembangunan, sebagai jembatan yang meneruskan perjalanan kita sebagai bangsa yang merdeka, berdaulat, bersatu dan maju. Perakitan kerangka landasan nasional ini pun akan kita lanjutkan, dan kita mantapkan di dalam Repelita V yang akan datang, sehingga sesudah itu bangsa Indonesia dapat tumbuh berkembang berdasarkan atas kekuatan sendiri, sebagai bangsa yang merdeka, berdaulat, bersatu dan maju.

Dengan demikian, tugas sejarah kita tidak akan menjadi makin ringan, akan tetapi akan menjadi semakin kompleks dan makin berat pula. Pembangunan nasional masih harus kita laksanakan di dalam situasi dunia yang tidak menentu, sarat dengan berbagai macam krisis dan permasalahan, dihantui oleh bayangan konflik dan peperangan yang tiada henti. Di tengah dunia yang seperti itu, kita harus tetap berpegang kepada konsep kebangsaan kita, yang memberi identitas kepada diri kita sebagai bangsa yang bersatu, merdeka dan berdaulat.

Kebangsaan adalah jiwa perekat dari kerangka landasan pembangunan nasional kita. Untuk itulah maka pemerintah amat memperhatikan pemba-

ngunan persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan krida ketiga dari Panca-krida, pemerintah berusaha untuk makin meningkatkan pembangunan bidang ideologi dengan makin memasyarakatkan P-4 dan demokrasi Pancasila dalam rangka persatuan dan kesatuan bangsa itu.

Dalam rangka pembangunan ekonomi, masih cukup banyak masalah yang kita hadapi dan yang akan dihadapi. Masalah lapangan kerja dan angkatan kerja, pertumbuhan kekuatan ekonomi nasional pada era pasca minyak, khususnya kekuatan-kekuatan ekonomi masyarakat, merupakan contoh permasalahan yang menuntut kemampuan kita untuk mengadakan "adjustment" yang kreatif-strategis terhadap perkembangan situasi ekonomi dunia.

Di tingkat kehidupan sosial budaya, telah dan akan terjadi pula perubahan nilai-nilai, terutama dengan tumbuhnya nilai-nilai baru yang terbawa dan juga dituntut oleh proses pembangunan itu sendiri.

Dalam pada itu, karena perkembangan negara dan masyarakat sedikit banyak dipengaruhi oleh sikap dan cara kerja pemerintahnya, maka perjalanan di masa datang itu pun membawa persoalan tentang peranan aparatur pemerintahan. Perjalanan bangsa Indonesia memerlukan pemerintah yang kuat. Namun, kekuatan ini tidak boleh menjadi tertutup, yang mungkin dapat mematikan pertumbuhan kekuatan masyarakat. Pendek kata, bangsa Indonesia memerlukan pemerintah yang kokoh, kuat, jujur, dan berwibawa, yang tidak terpecah-pecah karena kepentingan ideologi ataupun pamrih politik yang memecah persatuan bangsa. Dengan demikian, kita akan membina suatu kehidupan bangsa dan negara yang didukung oleh pemerintah yang kuat dan masyarakat yang kuat pula.

Semua hal yang kita hadapi itu, kiranya menyadarkan kita bahwa masa yang akan datang dari perjalanan bangsa Indonesia, tetap merupakan perjalanan perjuangan kebangsaan. Sebagaimana Bapak Presiden dalam pidato tanggal 16 Agustus 1985 yang lalu mengatakan: "Sebab bagi suatu bangsa pejuang, tidak ada titik akhir perjuangan."

## MENYONGSONG MASA DEPAN

Tugas bangsa Indonesia saat ini adalah: tetap meneruskan perjalanan sejarahnya. Pancasila telah mengamanatkan kepada kita untuk terus berusaha memenangkan perjuangan itu, membina kerangka landasan pembangunan nasional yang mantap mengantar perjalanan bangsa kita melewati masa transisi menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Perjalanan bangsa Indonesia yang akan semakin terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan dunia, dihadapkan pada tantangan baru di masa depan itu, yaitu: bagaimana agar kita dapat menguasai peradaban dunia tanpa kehilangan identitas sebagai bangsa yang merdeka, bersatu dan berdaulat.

Proses perkembangan dunia itu dipengaruhi oleh tumbuhnya peradaban dunia, di mana ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan kekuatan utamanya. Perangkat peradaban itu perlu kita kuasai, dan untuk itu kita perlu mengadakan persiapan-persiapan. Karena betapapun juga, kita harus memahami bahwa ilmu pengetahuan yang bergandengan dengan teknologi, akhir-akhir ini telah merintis transformasi struktural maupun kultural di tingkat dunia tersebut.

Perkembangan masa datang, bagaimana pun bentuk dan coraknya, kiranya perlu kita perhitungkan. Namun, pesan terdalam dari ideologi kita adalah bahwa di dalam menghadapi proses pertumbuhan dan perkembangan global, persatuan dan kesatuan kebangsaan kita tidaklah dapat ditawar-tawar. Bersatu kita teguh bercerai kita runtuh.

Keberhasilan pembangunan yang kita harapkan dan kita usahakan untuk terwujudnya di masa yang akan datang, pastilah merupakan bekal di dalam percaturan kita dengan situasi itu. Keberhasilan pembangunan akan dapat meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan bangsa di masa yang akan datang, dan kedua hal tersebut merupakan elemen utama dan sekaligus basis dari kekuatan kebudayaan, yang intinya adalah manusia modern.

Keberhasilan di dalam pembangunan yang makin meningkat dan meluas, memungkinkan pula bangsa Indonesia mewujudkan Wawasan Nusantara. Pertumbuhan masyarakat Indonesia sebagai wujud nyata Wawasan Nusantara itulah yang akan menjadi jembatan strategis yang mengaitkan perkembangan kebudayaan dan peradaban kebangsaan kita dengan perkembangan dan peradaban dunia di masa yang akan datang.